

Judul : Ajak Ketemu Di Toilet, Anggota Banggar Tanya Soal Duit "Amunisi"
Tanggal : Rabu, 01 Februari 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Timwas Dorong Revisi UU TKI

● ALI MANSUR

Kondisi TKI yang bekerja di laut lebih tragis.

JAKARTA — Tim Pengawas TKI DPR mendorong revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). UU itu harus mengatur pekerja pada sektor perikanan yang nasibnya memprihatinkan.

"Kami sepakat bagaimana regulasi harus diratifikasi tentang konvensi perlindungan pekerja rumah tangga dan ABK di sektor perikanan dengan mekanisme undang-undang," kata anggota Timwas TKI DPR, Rieke Diah Pitaloka, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Hal itu dikatakannya usai mendampingi Ketua Timwas TKI Fahri Hamzah menerima perwakilan beberapa organisasi buruh migran di Ruang Rapat Pimpinan DPR.

Dia mengatakan, selama ini pekerja pada sektor perikanan belum diatur lebih rinci sehingga proses perlingkungannya harus dikuatkan dalam produk UU.

Dalam diskusi dengan organisasi buruh, disampaikan ada indikasi perdagangan orang. Sebanyak 45 orang TKI saat ini berada di penampungan, Jeddah, Arab Saudi. Dua orang sudah dikeluarkan, tapi kemungkinan dipekerjakan kembali. Rieke mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan bersama. Pihaknya menggelar solidaritas bersama untuk menangani kasus ini.

Rieke mengatakan, kalangan buruh meminta bantuan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk membantu langkah pembebasan 43 TKI yang masih tertahan. Mereka mengklaim, aturan Kerajaan Arab Saudi tidak membolehkan pembebasan mereka tanpa melibatkan pihak Kementerian Luar Negeri Saudi dan otoritas setempat. "Ini persoalan kemanusiaan, kita menunggu lobi politik tingkat tinggi untuk membantu evakuasi 43 TKI yang masih di penampungan Jeddah," katanya.

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia Hariyanto mendesak revisi UU yang sama. Dia menilai, saat ini Indonesia bukan hanya memiliki pekerja migran di darat, melainkan juga di laut. Kondisi TKI yang bekerja di laut lebih tragis karena belum ada regulasi yang mengaturnya.

Ketua Timwas TKI Fahri Hamzah meminta pemerintah memperbaiki konsep

prapenempatan TKI. Sebab, permasalahan banyak terjadi dalam proses tersebut. Calon TKI kerap tidak dibina dan dididik sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM) mereka lemah. Selain itu, dokumen mereka kerap dipalsukan agar dapat segera diberangkatkan sebagai TKI.

Ia menyebutkan, 65 persen persoalan TKI ada di prapenempatan. Di sana merupakan awal dari perdagangan manusia hingga seorang menyogok untuk memalsukan umur. Dalam proses itu, calon TKI banyak yang tidak mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana hidup dengan masyarakat dengan budaya berbeda.

"Hal ini karena negara tidak memfasilitasi kegiatan prapenempatan dengan baik sehingga sering kita lihat ada TKI yang hilang, namun identitasnya tidak diketahui. Padahal, sebenarnya identitas mereka dipalsukan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR itu juga mengkritik kebijakan moratorium pengiriman TKI, misalnya, ke Jeddah, Arab Saudi. Kebijakan itu tidak disertai solusi yang ditawarkan pemerintah.

Menurut dia, kebijakan moratorium itu sudah dilakukan. Namun, di sisi lain, kebutuhan seorang harus dipenuhi sehingga memunculkan perdagangan manusia. "Karena tidak bekerja, akhirnya muncullah perdagangan manusia. Orang dijual melalui mekanisme seolah-olah bekerja di perusahaan, tapi kenyataannya menjadi pembantu," katanya.

Jika dimoratorium, calon TKI harus mendapatkan alternatif lapangan pekerjaan. Mereka harus tetap mendapatkan penghasilan. ■ antara ed: erdy nasrul

» Fakta Angka

163	korban perdagangan orang pada 2012-2014.
79	orang di antaranya bersedia didampingi untuk proses hukum.
106	kasus perdagangan orang pada 2016.
65	orang di antaranya dikembalikan ke Indonesia.

Sumber: Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)